



TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

¹Zulyani Hidayah, ²Alwi Ibrahim, dan ^{3*}Hasanuddin Saad
^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding author: hasanuddin@unida-aceh.ac.id

Abstract

Duties and functions of the DPRA Secretariat Carry out secretarial administration, financial administration, support the implementation of the DPRA's duties and functions, and provide and coordinate the expertise required by the DPRA in accordance with Regional financial capacity. The formulation of the problem 1) How the Task of the Secretariat of the Aceh House of Representatives (DPRA), 2) What is the Function of the Secretariat of the Aceh House of Representatives (DPRA), while the purpose of the research is 1) To find out and analyze the Tasks of the Secretariat of the Aceh People's Representative Council (DPRA), 2) To find out and analyze the function of the Secretariat of the Aceh House of Representatives (DPRA). The theoretical use of this research is a researcher's contribution to the development of administrative science and organizational culture in developing and implementing concepts in the mechanism in the Secretariat of the Aceh House of Representatives (DPRA). Whereas Practical Uses, the results of this study can be a reference for every stakeholder involved in the Aceh Special Representative Council (DPRA) Plenary Session, in understanding matters that are the responsibility of every institution involved in the said activity so as to cause synergy in the implementation. The research approach undertaken in this study is a qualitative approach with consideration of this study to determine the extent of the function of the Secretariat of the DPRA in the Implementation of Special Plenary of the Aceh People's Representative Council (DPRA), by means of observation and interviews while in the analysis carried out by conducting data reduction, data presentation and drawing conclusions that can be presented qualitatively, with the results of the study note that the Task Secretariat of the Aceh House of Representatives (DPRA), in the Implementation of Special Plenary of the Aceh People's Representative Council (DPRA), has not run optimally due to obstacles that occur in the field.

Keywords: *Tasks and Functions of the Aceh DPR Secretariat*

Abstrak

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA Melaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan keahlian yang dibutuhkan DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Rumusan masalah 1) Bagaimana Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), 2) Apa Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adapun tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), 2) Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi peneliti terhadap pengembangan ilmu administrasi dan budaya organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep dalam mekanisme di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Khusus (DPRA) Aceh, dalam memahami hal-hal yang menjadi tanggung jawab setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga menimbulkan sinergi dalam pelaksanaan. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana fungsi Sekretariat DPRA dalam Penyelenggaraan Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan cara observasi dan wawancara sedangkan dalam analisis dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan yang dapat disajikan secara kualitatif, dengan hasil kajian diketahui bahwa Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belum berjalan optimal karena kendala yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: *Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh.*

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja, akan tetapi menjalar sampai ke daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat melalui pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui pemberian wewenang kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam upaya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Di sisi lain pemerintah Indonesia mengasumsikan dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1997-1998, telah terjadi perubahan dalam pengaturan mengenai kedudukan, peran, fungsi DPRD di Indonesia. Perubahan tersebut menuntut adanya penguatan DPRD secara terprogram dan berkelanjutan, menuju negara demokrasi yang sesungguhnya. Disebut sesungguhnya karena selama ini Indonesia telah menjalankan berbagai jenis demokrasi, tetapi lebih banyak artifisial. Ada demokrasi terpimpin pada masa orde lama, ada pula demokrasi Pancasila pada masa orde baru, yang sebenarnya lebih banyak berupa penyimpangan dari demokrasi yang universal, atau merupakan sebuah upaya untuk mencari format demokrasi dengan citarasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sebagai penampung aspirasi masyarakat sedangkan kepala daerah selaku pimpinan daerah menyelenggarakan pemerintahan dalam upaya kesejahteraan rakyat dan tidak saling membawahi diantara keduanya, melainkan berada pada posisi yang berdampingan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kewajiban masing-masing (check and balance).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai simbol demokrasi di daerah, secara kelembagaan merupakan representasi dari rakyat yang berdaulat, dalam realitasnya belum berdaya menghadapi eksekutif, antara lain adanya paradigma lama pemerintah di daerah bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah masih tetap mengiang dan dijalankan dalam mempertahankan kekuasaan di daerah. Selain itu masih terbatasnya kualitas anggota DPRA serta dominannya kepentingan pribadi anggota dewan di atas kepentingan golongan. Demikian pula perkembangan kewenangan yang melekat dipengaruhi feodalisme, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya masih dibatasi terhadap kewenangan anggota dewan itu sendiri untuk menjalankan fungsinya terutama penggunaan hak yang sudah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRA. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dalam membangun demokrasi politik masyarakat dilakukan melalui "Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)".

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)? Bagaimana Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)? Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

2. Kajian Pustaka

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya sebagaimana Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2014: 101) menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu terhadap kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2013: 158) terdapat dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik sebagaimana Nugroho (2013: 79) menyebutkan bahwa “Kebijakan merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

2.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

a. Desentralisasi

Eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik yang bukan saja dalam kaitan relasi kuasa antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga relasi-relasi antara pemerintah ini kabupaten dan masyarakat daerah dan juga relasi antar daerah, dengan tujuan pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit dan sebagainya. Sebenarnya pendapat Friedman dalam Haris (2012: 40) menyebutkan sebagai berikut:

Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (Local government) sebagaimana disana terjadi “superior” government assigns responsibility, authority or function to “lower” government unit that is assumed to have some degree of outhority (adanya pembagian kewenangan serta tersedianya yang memadai untuk memaknai kewenangan diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi).

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam konsekwensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional tersebut membentuk daerah sebagaimana Prasojo (2011: 1.23) menyebutkan bahwa “Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya”. Dalam hal ini pemerintah daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan kepeahaman mengenai potensi daerah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap dalam pelayanan publik.

2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam teori Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia sebagai sumber utama dan asset dalam organisasi sehingga dalam tiap pelaksanaan tugas sudah barang tentu sangatlah penting dimana secara umum, dalam sebuah lembaga baik itu pemerintah maupun swasta, di mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di perlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana menurut Werther dan Davis dalam Sutrisno (2013: 33), menyebutkan bahwa “Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang sistematis tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tentang pegawai, dimana di ketahui dalam suatu proses bahwanya perencanaan Sumber daya manusia”.

Kerangka acuan tersebut sebagai rasa untuk mengintropeksi diri terhadap kekurangan dan kelebihan secara personal dalam kedudukan sebuah organisasi dengan pembebanan tugas yang diberikan dan tanggungjawab yang tinggi, karena Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu

produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

2.4 Organisasi

Teori organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan bersama yang didasari pada pendapat Fahmi (2016: 39) menyebutkan sebagai berikut “Organisasi adalah suatu kumpulan individu- individu yang berada dalam suatu lembaga maupun pemerintah, dimana dalam individu itu terdapat perbedaan satu sama lain dengan dimensi yang mencakup kultur, nilai-nilai, pendidikan, gender, status perkawinan, usia, pekerjaan dan sebagainya”. Dalam pencapaian tujuan bersama secara efektif di perlukan suatu manajemen yang baik, dan benar, dalam menggunakan sumber, maka cenderung masalah tersebut akan timbul kembali daya manajemen sangat penting dalam suatu organisasi, dimana mencapai suatu pengembangan organisasi di perlu peran semua pihak dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam pekerjaan sehingga diperlukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini, dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam pendekatan penelitian ini secara formal sebagaimana pandangan Soetandyo (2011: 65) menyebutkan bahwa metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (in depth) dan total/menyeluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel.

Demikian pula pemahaman penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sesuai sebagaimana pendapat Rakhmat (2011: 120) menyebutkan bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Pada dasarnya fokus penelitian sebagai unsur yang penting dalam upaya menitikberatkan pandangan pada suatu objek penelitian agar dapat memberikan hasil secara update. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala yang diteliti bersifat holistik, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang bersifat sinergis. Dalam pemahaman fokus penelitian ini sebagaimana pendapat Bungin (2013: 41) menyebutkan bahwa “Fokus penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang kenyataan”. Mencermati berbagai alasan dalam fenomena kehidupan manusia maka upaya menciptakan kerangka berfikir membutuhkan waktu, fasilitas, kemampuan (berfikir dan biaya) serta kerja keras. Fenomena yang ditemukan di lapangan tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak sesuai dalam kondisi sosial tertentu yang menarik untuk dapat diteliti, signifikan serta memerlukan adanya pemotretan, pemetaan gambaran dan pemahaman secara mendalam terhadap objek yang sekaligus dapat membantu pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh yang beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Banda Aceh dengan alasan pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa Sekretariat DPRA adalah tempat dilaksanakannya Paripurna Istimewa Pelantikan Kepala Daerah. Selain itu, Sekretariat DPRA juga sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang melakukan hubungan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dalam pelaksanaan Paripurna Istimewa Pelantikan Kepala Daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Lofland dalam Moleong (2014: 157) sumber data utama dalam penelitian kuantitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Sumber data merupakan hal yang utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang dapat diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait hanya untuk menunjang studi dokumen.

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif (descriptive qualitative research) dan sering sekali disebut sebagai metode penelitian naturalistik, hal ini dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural setting) sehingga data yang terkumpul dan analisisnya pun lebih bersifat kualitatif. Dengan demikian jika dicermati secara mendalam akan ditemui keberadaan teknik pengumpulan data ini sebagaimana pandangan dari Sugiyono (2013: 308) menyebutkan sebagai berikut "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, namun tujuan yang diinginkan dalam teknik pengumpulan data ini merupakan cara perolehan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian".

Untuk memudahkan penelitian ini maka penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan data yang diklasifikasikan atas 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) Proses Memasuki Lokasi Penelitian (Getting In); (2) Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along); dan (3) Mengumpulkan Data (logging the data).

Dalam hal penelitian yang bersifat kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sugiyono (2011: 244) menyebutkan bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles, Humberman, & Saldana (2014: 31-33) menyebutkan bahwa "Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam aktivitas data yaitu data condensation, data display dan conclusion drawing/verification.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Ada beberapa hal terkait dengan tugas Sekretariat DPRA seperti koordinasi, komunikasi, dan integrasi. Koordinasi, Suatu usaha yang sinkron dan saling ketergantungan dalam situasi kerja dalam pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi dalam Paripurna Istimewa dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu tahap penjabaran, tahap penanda tangan kerjasama, dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan koordinasi dalam suatu pemerintahan sangatlah penting. Hasil penelitian tersebut selaras dengan landasan teoritis sebagaimana pemahaman Shadana (2011: 169) yang menyebutkan menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, walaupun praktisnya dampak tersebut tidak selamanya sesuai harapan bahkan muncul dampak yang sama sekali tidak diharapkan (intended risk and unintended risk).

Komunikasi merupakan sekedar media penyampaian pesan antar pihak-pihak yang terlibat di dalam Penyelenggaraan Paripurna Istimewa yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Oleh sebab itu, agar komunikasi berjalan dengan baik dan lancar serta memberi manfaat baik bagi pihak penyampai pesan maupun bagi pihak penerima pesan, maka diperlukan adanya keterampilan komunikasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Meter & Horn dalam Winarno (2014:

102) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam hal Integrasi, suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Penyelenggaraan Paripurna Istimewa harus dapat mengurus mulai dari persiapan, termasuk juga mengawasi perlengkapan-perengkapan hingga menentukan macam jamuan makan atau menu makanan dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam memfasilitasi rapat Paripurna Istimewa. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Tim Pondok Edukasi (2011: 7) yang menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks yang melibatkan faktor geografis, aktor sosial dan sektor sosial. Geografis termasuk internasional, nasional, sub nasional dan lokal. Aktor sosial termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sektor sosial di dalamnya adalah semua bidang pembangunan politik, sosial, budaya dan lingkungan.

2. Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Dalam penelitian ini fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dikaji melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagai peranan Sekretaris suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan fasilitas mengenai rapat penyelenggaraan Paripurna Istimewa dalam membantu keperlancaran aktivitas pekerjaan Sekretaris sangat berdampak besar kegiatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Penyelenggaraan Paripurna Istimewa yang telah sesuai dengan konsep bahwa bagi daerah otonom yang lebih luas lebih bijaksana apabila diterjemahkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan urusan sesuai kebutuhan daerah dan dalam batas-batas kemampuan anggaran yang tersedia untuk membiayainya. Dengan demikian, otonomi yang luas tidak diartikan bebas semuanya dan dengan demikian pula maka daerah akan selalu mempertimbangkan bukan hanya sedikitnya urusan yang dilayani, akan tetapi lebih kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Wijaya, 2012).

Dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan waktu yang tersedia untuk melaksanakan semua program, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari untuk penyelenggaraan Paripurna Istimewa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah dipersiapkan sebelumnya agar terkesan baik dan sukses. Jatmiko (2013: 67) menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program, diantaranya *Strategy*, Rute yang dipilih oleh organisasi bagi pertumbuhan dimasa depan dimana sebuah rencana yang diformulasikan oleh organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan; *Structure*, kerangka kegiatan anggota organisasi dikoordinasikan; *System*, prosedur formal dan informal meliputi sistem inovasi, kompensasi, informasi manajemen; *Style (leadership/gaya)*, pendekatan kepemimpinan dari manajemen puncak dan pendekatan operasional keseluruhan organisasi; *Skills (keahlian/keterampilan)* apa yang terbaik dilakukan oleh organisasi, *what the company does best*, capabilitas dan kompetensi khusus; *Staff*, sumber daya manusia organisasi mengacu pada bagaimana orang dikembangkan, dilatih, disosialisasikan, diintegrasikan, motivasi, dan dikelola orang-orang dalam organisasi; dan *Shared values (nilai bersama)* awalnya disebut *superordinat* dimana konsep-konsep dan prinsip, pedoman dari organisasi dengan nilai-nilai aspirasi.

Untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan pemerintah dan juga untuk mengetahui kinerja aparatur dan tingkat pencapaian perubahan, terutama untuk mengetahui sistem penyelenggaraan Paripurna Istimewa di selenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tepat sasaran atau tujuan tercapai sebagaimana telah didefinisikan oleh Sedarmayanti (2016: 311) bahwa suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan.

5. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian ini, dapat kita simpulkan bahwa Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang meliputi Koordinasi berkaitan dengan kerja sama, suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terlambat aktivitas tertentu sehingga tidak tepat capaian tujuan dengan kurangnya saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, pengaturan pelaksanaan acara kurang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tanggung jawab, terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan terhadap penyelenggaraan paripurna untuk dapat mengambil keputusan dan kurang bertindak sehingga ada tekanan dari pihak manapun atau tidak secara bebas.

Integrasi berkaitan dengan kesatuan, himpunan dari bagian-bagian yang tidak saling berhubungan secara bersama sehingga kurang tercapai tujuan-tujuan yang tidak sama kemampuan, suatu fitur yang kurang kompleks dan tingkat mencerminkan interaksi antara volume kedua kegiatan fisik dan mental dan kurang kemampuan fungsional pekerja, kesehatan mereka dan penilaian subjektif dengan kebutuhan, perencanaan dan mempersiapkan suatu rapat atidak dapat berjalan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, harus berhubungan dengan berbagai pihak dengan penyelenggaraan suatu rapat yang di selenggarakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meliputi: Perencanaan berkaitan dengan menetapkan tujuan, kurang mempunyai sasaran yang lebih khusus terencana dalam penyelenggaraan rapat diselenggarakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Menjabarkan tujuan, aktivitas atau proses kurang mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada publik setelah melakukan penyelenggaraan rapat dan daftar tugas, merencanakan kegiatan yang tidak sasuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kegiatan rapat.

Evaluasi berkaitan dengan Teknis pelaksana, dalam tata cara rapat yang diatur oleh tatib DPR tidak ada kewajiban untuk meng hadiri rapat, yang ada menandatangani daftar hadir saja denagn Sumber daya manusia, melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri sebagai Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyediakan fasilitas, segala sesuatu yang berupa benda kurang sempurna sehingga tidak dapat memudahkan serta mempelancar pelaksanaan rapat.

Daftar Pustaka

- Adisubrata, W. S. (2013). *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Agustino. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aizuddin. (2016). *Fungsi Badan Legislasi DPRK Aceh Jaya dalam rangka Pembuatan Qanun Daerah*. [Tesis: Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh].
- Alyas, M. (2012). *Wajah Ganda Otonomi Daerah*. Surabaya: Yayasan Pembaharuan Indonesia (YPI).
- Amirulkamar, S. (2017). *Kebijakan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Arif, S. (2011). *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press.
- Bangun, W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga (Anggota IKAPI).
- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format. Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Chabib., Soleh., & Suropto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Darma. (2013). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eaton. (2011). *Pengembangan Dana keuangan*. Bandung: PT. Mediabeta.
- Fahmi. (2016). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Haris, S. (2012). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Hasibuan, M. (2012). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Iswanto. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Koentjaraningrat. (2012). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Kunandar. (2011). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Liliweri, A. (2014). *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marijan. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Masuryadi. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepegawaian Negara (Bea Cukai)*. [Tesis: Universitas Surabaya, Surabaya].
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*, (Terj. Rohidi, T. R.). Jakarta: UI-Press.
- Moekijat. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, C. (2013). *Pemerintahan Lokal dan Partisipasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawir Is. (2016). *Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*. [Tesis: Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh].
- Natzir. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: PT. Fajar. Iterpratama Mandiri.
- Notoatmodjo. (2012). *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Prasojo, E. (2011). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Uiversitas Terbuka.
- Purwanto. (2013). *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sadhana, K. (2011). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra.
- Sanjaya, W. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso. (2012). *Pengetahuan Dasar Organisasi*. Jakarta: Penerbit Atma Jaya.
- Amirulkamar, S. (2014). *Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*. [Tesis: Universitas Merdeka Malang, Malang].
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*. Jatinangor: IPDN PRESS.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Bandung. PT. Alfabeta.
- Sulistiyani. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryono. (2013). *Cara Mudah Bikin SOP*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sutopo, H. B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutrisno, E. (2013). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Thoha. (2013). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pondok Edukasi. (2011). *Pegangan Memahami Desentralisasi (Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi)*. Yogyakarta: Kirman
- Wahab, A. S. (2015). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. (2014). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wijaya. (2012). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Winardi. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Winarno. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.

Dokumen

- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokoler.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- Provinsi Aceh. (2016). Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
- Provinsi Aceh. (2008). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sebutan Nomenklatur Dan Titelatur Daerah.
- Provinsi Aceh. (2016). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.